

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia, adanya suatu pemberian hak kepada setiap daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri atau pemberian otonomi tidak lain untuk memberikan keleluasaan bagi setiap daerah dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing yang berbeda. Dengan begitu setiap daerah dapat mengembangkan dan mengelola sendiri pemerintahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan pemerintah daerah semakin besar. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, terkait erat dengan upaya pemberdayaan pemerintah daerah dalam aspek pembiayaan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan peraturan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwasanya setiap daerah memiliki hak dan tanggungjawab dalam mengelola rumah tangganya sendiri baik anggaran atau belanja daerah maupun aset daerah dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan kontribusi kepada setiap masyarakat.

Adanya suatu pemerintahan daerah dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat daerah sehingga dalam pengelolaan daerahnya sendiri diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu penunjang upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yaitu terpenuhinya akan kebutuhan aset pemerintah sebagai aspek yang memberikan manfaat bagi berjalannya suatu pemerintahan daerah. Aset merupakan salah satu aspek penting dalam penunjang jalannya suatu pemerintahan daerah.

Pada lampiran II dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pernyataan No.01 penyajian laporan keuangan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (Supriyadi,2011:69)

Aset dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, salah satunya aset tetap. Didalam aset tetap sendiri terdapat banyak macam jenis aset yang tergolong di dalamnya seperti tanah, gedung, alat-alat, mesin dan lain-lain.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Mursyidi.2009:182)

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Tidak termasuk aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*). (supriyadi,2011:70)

Aset tetap mempunyai sifat khusus yaitu dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun (lebih dari satu periode akuntansi). Salah satu bagian dari aset tetap yaitu aset tetap berwujud yang terdiri dari beberapa jenis aset diantaranya gedung, tanah, mesin, alat-alat kendaraan, mebel atau *furniture* dan lain-lain. Sebagian macam dari aset tetap berwujud ini memiliki andil yang sama dalam ikut berkontribusi dengan jalannya pemerintahan daerah.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan maksud untuk di jual. (Mursyidi.2009:184)

Aset gedung dan bangunan merupakan salah satu jenis aset tetap berwujud yang ada dalam setiap lembaga pemerintahan dan salah satu jenis aset yang penting dalam jalannya kegiatan pemerintahan daerah. Gedung dan bangunan bisa terdiri dari gedung-gedung pemerintahan dan gedung-gedung penunjang sarana dan prasarana lainnya.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. (Mursyidi.2009: 182)

Dalam pemanfaatannya, aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun akan mengalami penurunan baik itu nilai maupun manfaatnya. Semua aset tetap kecuali tanah yang dipergunakan dalam jangka panjang, lambat laun akan aus atau nilai manfaatnya semakin berkurang, sampai pada akhirnya aset tetap tersebut tidak dapat dipergunakan lagi atau habis masa ekonomisnya.

Sehingga perlu adanya suatu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengetahui apakah aset tersebut masih memiliki nilai dan manfaat yang sama atau tidak. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penukaran, pelepasan dan penghapusan.

Penurunan nilai maupun manfaat suatu aset, khususnya aset tetap dapat menggunakan metode penyusutan pada aset tetap. penyusutan dilakukan untuk mengetahui nilai suatu aset karena manfaat atau kapasitas dari aset tetap semakin lama semakin menurun karena penggunaannya dalam kegiatan pemerintah sehingga nilai aset tetap tersebut mengalami penurunan. (Mursyidi,2009: 212)

Penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya. Hal ini akan memberi informasi kepada pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Di lembaga pemerintahan perlu diketahui apakah metode penyusutan yang digunakan benar-benar memperhatikan nilai manfaat dari aset tetap yang menurun maupun penurunan nilai aset itu sendiri yang disebabkan oleh berlalunya waktu. Dengan memperhatikan beberapa aspek yang ada, diharapkan dalam penggunaan metode penyusutan aset sesuai dengan klasifikasi aset itu sendiri dan menjadikan lembar penyusutan aset tersebut sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah di masa depan.

Namun pada implementasinya, masih banyak persoalan-persoalan mengenai penyusutan aset tetap ini. Seperti halnya metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap tidak sesuai dengan aset yang ada serta penetapan nilai masa manfaat dan nilai perolehan yang kurang tepat sehingga menjadikan nilai penyusutan aset tetap tidak relevan.

Pada dinas pendidikan kabupaten Bogor khususnya, aset merupakan salah satu faktor penting dalam penunjang jalannya suatu pemerintahan. aset tetap merupakan akun yang mendominasi dan memiliki nilai yang tinggi dalam laporan keuangan. Untuk itu pentingnya aset tetap ini dalam berjalannya suatu roda pemerintahan harus sangat di pertimbangkan.

Berikut data aset tetap gedung dan bangunan dinas pendidikan kabupaten Bogor.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

NO	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1945	334.441.700
2	Bangunan Gedung Kantor permanen	1985	560.565.000
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2000	18.981.000
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2003	114.111.000
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2006	250.378.920
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2007	822.710.000
7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	250.000.000
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2009	85.912.898
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2010	3.688.221.450
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2013	78.337.000
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015	561.673.450

Mengingat pentingnya aset tetap khususnya Gedung dan Bangunan dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu penunjang kegiatan pemerintah daerah, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Nilai Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sekretariat Dinas Menggunakan Metode Garis Lurus Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil yaitu :

1. Nilai penyusutan yang ada di neraca pada dinas pendidikan kabupaten Bogor masih diindikasi bersifat subjektif.
2. Penyusutan aset tetap merupakan penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum aset tetap gedung dan bangunan pada dinas pendidikan kabupaten Bogor?
2. Berapakan nilai metode penyusutan aset tetap gedung dan bangunan menggunakan metode garis lurus yang digunakan peneliti pada dinas pendidikan kabupaten Bogor ?
3. Apakah terdapat selisih dari hasil perhitungan penyusutan aset tetap gedung dan bangunan menggunakan metode garis lurus dengan nilai penyusutan pada dinas pendidikan kabupaten Bogor?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran umum aset tetap gedung dan bangunan pada dinas pendidikan kabupaten Bogor .
2. Untuk mengetahui nilai penyusutan gedung dan bangunan menggunakan metode garis lurus yang digunakan peneliti pada dinas pendidikan kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya selisih dari hasil perhitungan penyusutan aset tetap gedung dan bangunan menggunakan metode garis lurus yang digunakan peneliti dengan dinas pendidikan kabupaten Bogor.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yang ingin penulis capai yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya teknik penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan yang dibahas dalam penelitian ini dan menjadikan penelitian ini sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan.



b) Bagi Pembaca

Penulis berharap dengan diadakannya penelitian ini memberikan kontribusi serta manfaat kepada pembaca sehingga dapat menciptakan orang-orang yang berintelektual khususnya dalam bidang penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Dinas pendidikan kabupaten Bogor dalam hal penyusutan aset tetap khususnya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi komponen yang ada didalam lingkungan dinas pendidikan kabupaten Bogor dalam pengolahan dan penyusutan aset tetap.

**F. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran terdiri dari tiga konsep yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Operasional Theory*. Dimana *grand theory* yang digunakan yaitu keuangan negara, *middle theory* menggunakan teori akuntansi sektor publik dan *operasional theory* menggunakan teori penyusutan aset tetap.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Indra Bastian Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. (Bastain,2005:15)

Dalam bukunya, Mursyidi menjelaskan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan dan manfaat dari suatu aset. Tujuan dasar penyusutan yaitu untuk mengetahui nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu, untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat diakibatkan pemakaian aset dalam kegiatan pemerintahan.(Mursyidi.2009 :212).

Dalam penyusutan, aset tetap bergantung pada empat faktor sebagai berikut :

1. Penetapan nilai aset tetap yang disusutkan
2. Umur dan kapasitas manfaat aset tetap yang sesuai dengan karakteristik aset tetap yang bersangkutan
3. Pemilihan metode penyusutan
4. Cara pencatatan, penyajian dan pengungkapannya. (Mursyidi.2009 :21)



**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran**